



Jadwal Vaksinasi Covid-19 Mundur

JAKARTA—Vaksinasi Covid-19 mundur dari jadwal yang direncanakan pemerintah sebelumnya.

Lupas Subarkah, Ujang Hasanudin, & Lajeng Padmaratri
redaksi@harianjogja.com

- ▶ Untuk bisa melakukan vaksinasi, pemerintah Indonesia juga akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat.
- ▶ Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 40 penambahan kasus positif pada Rabu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan vaksinasi Covid-19 kemungkinan akan dimulai pekan ketiga Desember 2020. Rencana itu mundur dari jadwal awal yang disebut-sebut akan dimulai November ini.

"Kami akan melakukan vaksinasi di pekan ketiga Desember," kata Luhut dalam paparan pada acara *The 7th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources (SDSWR)* secara virtual, Rabu (4/11).

Luhut mengatakan saat ini sedang dilakukan uji klinis fase ketiga di Bandung, Jawa Barat, yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma.

Untuk bisa melakukan vaksinasi, pemerintah Indonesia juga akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Sayangnya [vaksinasi akan dilakukan pada] sekitar sembilan juta orang di wilayah spesifik yang kami percaya berkontribusi besar pada tingginya kasus Covid-19. Di Jakarta, misalnya, ada sejumlah area yang kami percaya berkontribusi besar pada kasus Covid-19 dan berikan mereka suntikan," ujar Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu.



Jadwal Vaksinasi...

Luhut menambahkan dalam jangka pendek, pemerintah menargetkan bisa membuat wilayah Bali menjadi zona hijau pada awal 2021 mendatang menyusul vaksinasi pada pekan ketiga Desember itu. "Kami ingin lihat Bali jadi zona hijau harapannya pada awal tahun depan karena kita akan mulai vaksinasi mulai pekan ketiga Desember," ujarnya.

Sebelumnya, Luhut mengatakan rencana vaksinasi Covid-19 yang tadinya dimulai sekitar pekan kedua November bisa saja molor.

Menurut dia, kemungkinan mundurnya jadwal vaksinasi bukan karena tidak adanya pasokan vaksin, melainkan karena dibutuhkan waktu bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bisa mengeluarkan *emergency use authorization*.

Penambahan Pasien

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 40 penambahan kasus positif pada Rabu. Kabupaten Sleman mendominasi penambahan ini sebanyak 19 kasus. Sementara 49 kasus dinyatakan sembuh dan dua kasus dilaporkan meninggal.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, menjelaskan penambahan kasus berdasarkan domisilinya meliputi Kota Jogja (tiga kasus), Bantul (tujuh kasus), Gunungkidul (11 kasus), dan Sleman (19 kasus). "Dari pemeriksaan pada 503 sampel dari 480 orang," ujarnya.

Dilihat dari riwayatnya, penambahan kasus terdiri dari *tracing* kasus positif 22 kasus, pemeriksaan mandiri (empat kasus), *screening* karyawan (satu kasus), perjalanan luar daerah (lima kasus), dan dalam penelusuran (delapan kasus). Sebanyak dua

kasus meninggal yakni kasus 3.890, laki-laki, 64, warga Sleman dengan komorbid hipertensi dan Kasus 3.948, laki-laki, 62, warga Bantul, dengan komorbid hipertensi dan hepatitis akut.

Adapun kasus sembuh berdasarkan domisili meliputi Kota Jogja (dua kasus), Bantul (24 kasus), Kulonprogo (empat kasus), Gunungkidul (satu kasus), dan Sleman (16 kasus). Dengan penambahan ini maka total kasus positif DIY menjadi sebanyak 3.972 kasus, dengan 3.278 kasus sembuh dan 97 kasus meninggal.

Terkait *screening* yang dilakukan Pemda DIY kepada pelaku wisata pascacalibur panjang akhir pekan, ia mengungkapkan belum ada info dari kabupaten dan kota. "Pelaksanaan *screening* dan *tracing* dari kabupaten dan kota," katanya.

Destinasi Wisata

Terkait *screening* pelaku wisata pada libur panjang akhir pekan, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakannya di destinasi wisata Tebing Breksi mulai Kamis (29/10) lalu. Destinasi wisata ini menjadi sampel lantaran angka kunjungan wisatanya tergolong tinggi di Kabupaten Sleman.

Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Joko Hastaryo menuturkan dari pelaksanaan sampling pemetaan Covid-19 pada destinasi wisata itu diambil 101 wisatawan dan karyawan objek wisata yang menjadi sampel. Sampel ini diikutkan dalam *rapid diagnostic test* (RDT) Covid-19. "Ada tiga yang reaktif. Sudah di-swab, hasilnya negatif," kata Joko ketika dihubungi *Harian Jogja* pada Rabu.

Ketiga orang yang hasilnya reaktif itu merupakan wisatawan dari luar DIY. Bahkan, dua di antaranya berasal dari luar Pulau Jawa. Disinggung soal apakah

program *screening* sampel terhadap wisatawan ini perlu dilanjutkan, Joko memastikan bahwa sistem sampling ini penting. Kendati demikian, ia masih memetakan skala prioritas dalam melacak kasus Covid-19 di Kabupaten Sleman.

"Sebetulnya perlu (sampling di destinasi wisata), tapi kami harus lakukan skala prioritas, tetap *tracing* kasus positif yang harus kami dahulukan. Yang kontak erat langsung *swab*, yang kontak tidak erat RDT, yang reaktif juga langsung di-swab," ujarnya.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Sri Wahyu Joko Santoso mengatakan Kabupaten Bantul tidak memilih *screening* bagi pelaku wisata seperti yang dilakukan daerah lain. Yang dilakukan adalah pengawasan dan pengetatan protokol kesehatan di objek wisata.

"Kami tidak ada target ke sana (*screening* pelaku wisata)," kata Sri Wahyu Joko Santoso.

Menurut pria yang akrab disapa Oki ini *screening* pelaku wisata karena berkaitan dengan hak orang berwisata. Jikapun ditemukan ada yang positif, kata dia, penelusurannya juga cukup sulit karena orang berwisata sudah mendatangi berbagai tempat dan tidak tinggal di Bantul.

Oki mengatakan Bantul lebih memilih *screening* bagi warga Bantul dan orang yang sudah tinggal di Bantul seperti lembaga pendidikan, perkantoran, guru, dan lembaga yang berpotensi terjadinya penularan Covid-19. Sementara di objek wisata hanya pengetatan protokol kesehatan dan pengawasan. "Kami tidak akan batasi hak mereka wisata ke sini *mangga* (silakan) selama melakukan protokol kesehatan. Kuncinya itu," ujar Oki. (JIBI/Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005